

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Oleh:

Kadek Agus Wardana¹, I Made Wirahadi Kusuma²

Email:

agoes.wardana89@gmail.com¹; wirahadikusuma200030@gmail.com²

^{1,2} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa

Abstract

The article titled "Politicization of the Teacher's Role in Character Formation of Students" discusses how political intervention in the world of education affects the performance and function of teachers as educators and character builders of students. Thru a literature study of various news sources and online articles, this research highlights two main aspects: the impact of politicization on the role of teachers and efforts to maintain teacher professionalism amidst political pressure. The politicization of education can reduce neutrality, disrupt the learning process, and weaken the role of teachers as moral role models. However, teacher professionalism can be maintained thru improved competence, strengthening professional ethics, and policy support that favors educational independence. Thus, teachers are expected to maintain integrity and focus on objectively and fairly shaping students' character.

Keywords: *Politicization; teachers; student character*

Abstrak

Artikel berjudul “Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa” membahas bagaimana intervensi politik dalam dunia pendidikan memengaruhi kinerja dan fungsi guru sebagai pendidik sekaligus pembentuk karakter peserta didik. Melalui studi literatur dari berbagai sumber berita dan artikel online, penelitian ini menyoroti dua aspek utama, yaitu dampak politisasi terhadap peran guru dan upaya menjaga profesionalitas guru di tengah tekanan politik. Politisasi pendidikan dapat menurunkan netralitas, mengganggu proses pembelajaran, serta melemahkan fungsi guru sebagai teladan moral. Namun, profesionalitas guru dapat tetap terjaga melalui peningkatan kompetensi, penguatan etika profesi, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada independensi pendidikan. Dengan demikian, guru diharapkan mampu mempertahankan integritas dan fokus pada pembentukan karakter siswa secara objektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Politisasi; guru; karakter siswa

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Kadek Agus Wardana, I Made Wirahadi Kusuma

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia karena memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa dampak pada perubahan dan kemajuan yang semakin kompleks. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial serta tuntutan-tuntutan baru yang sebelumnya sulit diprediksi, sehingga dunia pendidikan kerap menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara harapan dan hasil yang dicapai dari proses pembelajaran (Syah, M. 2004:39). Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan memiliki peranan yang sangat vital. Proses pendidikan membutuhkan perhatian dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak agar tujuan pembentukan manusia yang cerdas dan berakarakter dapat terwujud. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan di bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama, karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Oleh sebab itu, seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan mulai dari siswa, guru, proses belajar-mengajar, manajemen, layanan pendidikan, hingga sarana dan prasarana pendukung harus terkoordinasi dan bekerja sama secara sinergis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Azwar, 2003).

Hampir semua negara di dunia saat ini telah memasuki era teknologi. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aktivitas manusia, termasuk disektor pendidikan. Di Indonesia, dunia pendidikan juga telah memasuki era digital. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai mengutamakan program digitalisasi sekolah. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembaruan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah. Tujuan utamanya adalah mencetak generasi yang literat teknologi dan informasi, dengan harapan dapat membawa Indonesia menjadi bangsa berperadaban maju. Tapi teknologi juga tidak menutup kemungkinan untuk merusak generasi dan membawa peserta didik tersebut keranah negatif.

Kehadiran teknologi digital, seperti internet, smartphone, dan media sosial, telah memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber belajar tanpa batas ruang dan waktu. Pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring, kolaboratif, dan interaktif melalui berbagai platform digital yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar. Dengan demikian, teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, efektivitas pembelajaran, serta kemandirian belajar peserta didik.

Dibalik dampak positif tersebut, kemajuan teknologi juga membawa sejumlah tantangan dan dampak negatif yang signifikan terhadap peserta didik. Penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa pengawasan dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, meningkatnya perilaku konsumtif terhadap gawai, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, akses yang terlalu luas terhadap informasi di dunia maya membuka peluang bagi peserta didik untuk terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, nilai moral, maupun budaya bangsa. Kondisi ini tentu dapat menghambat proses pembentukan karakter dan moralitas peserta didik yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan. Fenomena *cyberbullying*, kecanduan media sosial, serta penyalahgunaan teknologi dalam bentuk plagiarisme akademik merupakan contoh konkret dari dampak negatif yang muncul akibat kurangnya literasi digital dan kontrol diri.

Guru dan orang tua sering kali dihadapkan pada dilema antara memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar dengan risiko penyalahgunaannya oleh anak didik. Akibatnya, fungsi pendidikan yang seharusnya membentuk peserta didik menjadi individu berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab, justru berpotensi terganggu oleh efek samping dari penggunaan teknologi yang tidak bijak. Seperti yang terjadi baru-baru ini mengejutkan dunia pendidikan yang penulis kutip dari laman [bbc.com](https://www.bbc.com) adalah sebagai berikut:

“Seorang mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy Anugerah Saputera (22) ditemukan meninggal dunia setelah diduga melompat dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada Rabu (15/10). Ia sempat mendapat perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya perundungan (*bullying*) yang mungkin dialami korban, terutama setelah muncul tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp himpunan mahasiswa dan BEM, yang menunjukkan candaan dan olok-olok terhadap kondisi korban alih-alih empati. Percakapan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu kemarahan publik. Pihak Universitas Udayana menyampaikan klarifikasi bahwa isi percakapan yang beredar terjadi setelah korban meninggal dunia dan tidak berkaitan langsung dengan penyebab korban melompat. Sementara itu, Kepolisian Sektor Denpasar masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan dugaan adanya unsur perundungan dalam kasus tragis ini” (<https://www.bbc.com/indonesia/articles> diakses tanggal 29 Oktober 2025).

Kasus kematian Timothy Anugerah Saputera menyoroti isu serius tentang kesejahteraan mental mahasiswa dan potensi perundungan di lingkungan kampus. Reaksi nir-empati dari rekan mahasiswa menimbulkan keprihatinan publik terhadap krisis empati dan etika sosial di dunia pendidikan tinggi, sementara pihak universitas dan kepolisian masih berupaya mengungkap kebenaran di balik

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

peristiwa tersebut, selain itu terjadi kembali kasus yang menimpa seorang kepala sekolah terkait menampar seorang siswa dikarenakan merokok diareal sekolah. Kasus tersebut dikutip penulis dari laman detik.com adalah sebagai berikut:

Dini Fitri menegur seorang siswa yang ketahuan merokok di area kantin sekolah saat kegiatan Jumat Bersih. Dalam kondisi emosi, Dini diduga menampar atau memukul pelan siswa tersebut sebagai bentuk tindakan disiplin. Tindakan ini kemudian viral di media sosial dan orang tua siswa melapor ke polisi, sehingga Dini dinonaktifkan sementara dari jabatannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dini Fitri mengklarifikasi bahwa tidak ada pemukulan keras, dan tindakannya dilakukan secara spontan karena emosi setelah siswa berbohong dan mengelak merokok di lingkungan sekolah” (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8161918/fakta-fakta-kepala-sman-1-cimarga-tampar-siswa-gegara-ketahuan-merokok> diakses tanggal 25 Oktober 2025).

Ditengah meningkatnya kejadian-kejadian seperti yang telah dikutip dalam laman-laman tersebut perlu adanya pemahaman yang mendalam dan pendekatan strategis dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi harus disertai dengan pendidikan karakter dan penguatan literasi digital agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. pendidikan di era digital tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda sebagai penerus bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dapat ditanamkan sejak dini. Namun, dalam praktiknya, proses pendidikan sering kali terbelenggu oleh aturan birokratis dan tekanan administratif yang membatasi kreativitas serta kebebasan pendidik dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Padahal, kebebasan dalam dunia pendidikan sangat penting agar guru dan lembaga pendidikan dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi peserta didik.

Generasi muda Indonesia tengah dipersiapkan menjadi Generasi Emas 2045, yaitu generasi yang diharapkan mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang berdaya saing global. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus menumbuhkan karakter kuat seperti integritas, kedisiplinan, empati, dan semangat kebangsaan. Hal ini hanya dapat terwujud apabila tenaga pendidik diberi ruang kebebasan dalam mengembangkan kurikulum, strategi pembelajaran, serta pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Kebebasan pendidikan bukan berarti tanpa batas, melainkan memberikan kepercayaan kepada pendidik untuk menanamkan nilai-nilai positif melalui cara yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Kadek Agus Wardana, I Made Wirahadi Kusuma

Pendidikan yang bebas dan bertanggung jawab akan menjadi kunci dalam melahirkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, berkarakter kuat, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam dunia pendidikan, peran orang tua dan pendidik memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak. Namun, tidak sedikit orang tua yang serta-merta menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Mereka beranggapan bahwa segala bentuk pembelajaran, baik yang berkaitan dengan pengetahuan maupun pembentukan moral, merupakan tanggung jawab penuh pendidik. Padahal, proses pendidikan sejatinya merupakan kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Ketika orang tua hanya menjadi penonton dan tidak turut berperan aktif, keseimbangan antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter anak menjadi sulit tercapai. Kepercayaan kepada guru memang penting, namun tetap perlu dibarengi dengan keterlibatan orang tua agar nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan di sekolah dapat sejalan dengan pembinaan di rumah.

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang berkarakter, beretika, dan bermoral. Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan sosial, budaya, dan teknologi, peran pendidikan karakter menjadi semakin penting. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial kepada setiap peserta didik. Namun, upaya ini tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengembangan pendidikan berperan penting dalam mendorong penerapan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan.

Melalui kebijakan, pelatihan, serta pengawasan, dinas berupaya memastikan bahwa setiap sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas, disiplin, dan memiliki rasa empati tinggi. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai program seperti pembinaan guru, penguatan kurikulum berbasis karakter, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Selain dinas pendidikan, organisasi masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Lembaga keagamaan, kelompok pemuda, maupun organisasi sosial di lingkungan sekitar sekolah dapat menjadi mitra dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan kegiatan sosial. Kolaborasi antara sekolah dan organisasi masyarakat menciptakan sinergi yang memperkuat pendidikan karakter, sehingga siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Dukungan moral dan material dari pemerintah daerah, seperti penyediaan sarana prasarana, kegiatan pembinaan, serta kerja sama lintas instansi, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerapan pendidikan karakter di sekolah. Pemerintah daerah juga diharapkan menjadi teladan dalam membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong yang dapat ditiru oleh peserta didik. Dengan adanya kerja sama dari seluruh pihak dinas pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah setempat penerapan pendidikan karakter dan moral di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur-literatur seperti berita terkatual dan media online lainnya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari karya-karya ataupun literatur primer dari berbagai sumber seperti google scholar, jurnal online, dan berita online. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti dalam artikel, buku, ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis dari perkembangan pendidikan di era globalisasi yakni dari data koleksi, kemudian reduksi data, selanjutnya *display data* dan terakhir adalah penyimpulan data. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan refleksi terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

III. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 1, pendidikan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, serta pelatihan agar mereka siap menjalankan peran di masa depan. Pendidikan bukanlah tanggung jawab tenaga pendidik dan siswa semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh pihak tersebut sangat diperlukan. Salah satu persoalan penting dalam dunia pendidikan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah rendahnya prestasi belajar siswa, terutama terkait dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Perbedaan prestasi belajar antar siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang berasal dari diri siswa sendiri seperti kemampuan intelektual, minat, serta motivasi belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh dari lingkungan pendidikan, baik lingkungan

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Syah, 2004).

Prestasi belajar yang baik hanya dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Keterkaitan antara siswa dan lingkungan pendidikannya sangat erat, sehingga kualitas prestasi belajar sering kali mencerminkan kondisi lingkungan tempat siswa belajar. Lingkungan yang positif akan mendukung peningkatan prestasi belajar, sementara lingkungan yang kurang mendukung dapat berdampak sebaliknya. Dalam hal ini, keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan paling berpengaruh karena sejak lahir seorang anak tumbuh dan belajar di dalam keluarga (Dimiyati & Mudjiono, 2002:16). Waktu anak di rumah yang lebih banyak dibandingkan di sekolah juga membuat peran orang tua menjadi sangat penting dalam membentuk perilaku dan prestasi belajar anak (Slameto, 1995:9). Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar dan membantu anak dalam proses belajar. Orang tua dapat memberikan dukungan berupa bimbingan belajar, penyediaan fasilitas pendidikan, serta motivasi agar anak dapat mencapai hasil belajar yang optimal (Slameto, 1995:61).

Tingkat perhatian dan dukungan tersebut berbeda-beda tergantung pada latar belakang pendidikan dan kesadaran orang tua. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya mampu memberikan bimbingan yang lebih bermakna, sedangkan orang tua yang kurang peduli dapat menyebabkan anaknya mengalami kesulitan belajar dan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Faktor-faktor seperti sarana dan prasarana belajar, kondisi gedung sekolah, serta lingkungan fisik dan sosial sekolah turut memengaruhi semangat belajar siswa (Slameto, 1995:71). Sebagai makhluk sosial, siswa tidak dapat terlepas dari pengaruh masyarakat sekitarnya. Perilaku dan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungannya (Sunarto & Hartono, 2002:61). Lingkungan sosial yang positif dan kondusif dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar, sedangkan lingkungan yang negatif dapat menjadi hambatan dalam mencapai prestasi belajar yang baik (Slameto, 2003:71). Sayangnya, tidak semua siswa memiliki lingkungan sosial yang mendukung. Banyak di antara mereka yang lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain daripada belajar karena pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaruh lingkungan pendidikan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Pendidikan yang dipolitisasi bisa berdampak pada orientasi pendidikan. Kebijakan-kebijakan dari diterapkan di sekolah yang sesuai dengan kurikulum serta visi dan misi sekolah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan generasi bangsa terkadang ikut dipolitisasi didalamnya oleh oknum-oknum pejabat terkait dalam membantu siswa-siswa yang bermasalah. Berikut beberapa pembahasan ketika pendidikan dipolitisasi dari berbagai pihak adalah sebagai berikut:

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

a) Dampak Politisasi terhadap Peran Guru

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian pengetahuan dan pelestarian budaya, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Sementara itu, politik berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan, pengaruh, dan otoritas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nilai-nilai serta distribusi sumber daya.

Hubungan antara pendidikan dan politik sangat erat karena keduanya saling berinteraksi dalam proses pewarisan nilai-nilai dan pengaturan sistem sosial di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 46 dan 47 mengenai pendanaan pendidikan, dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang bersifat umum maupun khusus, secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keterkaitan antara pendidikan dan politik sangat kuat karena arah pembangunan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan pihak yang memegang kendali politik. Politik berperan dalam menentukan kurikulum, kebijakan gaji guru, pengadaan infrastruktur pendidikan, serta penyediaan sumber daya pendukung seperti pelatihan tenaga pendidik. Dengan demikian, arah dan kualitas pendidikan sangat tergantung pada siapa yang memimpin dan bagaimana kebijakan politik tersebut diterapkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik terhadap pendidikan merupakan isu yang kompleks. Keputusan politik dalam hal alokasi anggaran, penyusunan kurikulum, dan kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak besar terhadap pemerataan serta kualitas pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan terkadang dijadikan sebagai alat politik, di mana kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dibandingkan kebutuhan jangka panjang dunia pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan serius, terutama di

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

daerah terpencil dan miskin, karena kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat proses pembelajaran, menciptakan ketidakstabilan di lingkungan pendidikan, serta menurunkan kualitas hasil belajar siswa. Seperti dalam berita yang dikutip oleh penulis adalah sebagai berikut:

“Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Dr. Made Sedana, M.Pd., menanggapi kasus dugaan perundungan (*bullying*) yang melibatkan seorang guru SMP Negeri 5 Singaraja dan telah dilaporkan ke Anggota DPD RI, Arya Weda Karna (AWK). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara internal di sekolah. Menurutnya, guru dan orang tua siswa telah bertemu, dan sang siswa mengakui kesalahannya serta meminta maaf. Made Sedana menilai seharusnya AWK menghormati sistem pendidikan yang berlaku, karena sekolah memiliki mekanisme penyelesaian berjenjang melalui kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ia menegaskan bahwa DPD RI sebaiknya fokus pada isu-isu berskala nasional (makro), sementara persoalan di tingkat sekolah sebaiknya diserahkan kepada pihak terkait di daerah. Ia juga mengingatkan agar kasus yang telah selesai tidak diperpanjang karena dapat mengganggu psikologis siswa dan guru serta menghambat proses belajar mengajar. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, AWK belum memberikan tanggapan, meskipun telah beberapa kali dihubungi melalui telepon dan WhatsApp oleh awak media” (<https://www.baliberkarya.com> diakses tanggal 30 Oktober 2025).

Kasus yang terjadi di SMP Negeri 5 Singaraja menggambarkan adanya potensi politisasi dalam dunia pendidikan, di mana persoalan internal sekolah yang bersifat sederhana dan dapat diselesaikan melalui mekanisme pendidikan justru ditarik ke ranah politik yang lebih luas. Dalam kasus ini, seorang guru diduga melakukan tindakan perundungan terhadap siswanya dan kemudian dilaporkan ke Anggota DPD RI, Arya Weda Karna (AWK). Padahal, menurut Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Dr. Made Sedana, M.Pd., masalah tersebut sudah diselesaikan secara baik di tingkat sekolah melalui pertemuan antara pihak guru, siswa, dan orang tua. Bahkan, siswa yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

Dr. Made Sedana menegaskan bahwa sistem pendidikan sudah memiliki struktur dan mekanisme penyelesaian masalah yang jelas, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung. Oleh karena itu, campur tangan pihak eksternal seperti lembaga politik atau perwakilan legislatif seharusnya dilakukan secara proporsional, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga pendidikan di daerah. Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan politikus dalam urusan internal sekolah justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap kondisi psikologis guru dan siswa yang dapat terganggu akibat sorotan publik. Selain itu kewibawaan dan otonomi sekolah terkait campur tangan lembaga politik dalam penyelesaian masalah internal sekolah dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

pendidikan yang telah ada. Sekolah kehilangan otonominya karena keputusan dan penyelesaian masalah yang seharusnya dilakukan oleh pihak internal justru diintervensi oleh pihak luar. Selain itu publikasi dan perhatian politik terhadap kasus sederhana di sekolah dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi guru maupun siswa. Hal ini dapat memengaruhi semangat mengajar guru serta kenyamanan siswa dalam belajar, sehingga menghambat proses pembelajaran yang seharusnya berjalan kondusif.

Ketika masalah yang sudah diselesaikan secara internal kembali diperbesar oleh pihak luar, situasi di sekolah menjadi tidak stabil. Kondisi ini dapat mengalihkan fokus guru dan siswa dari kegiatan belajar mengajar ke persoalan non-akademik yang bersifat politis. Politisasi membuat dunia pendidikan rentan dijadikan sebagai panggung untuk menunjukkan kekuasaan atau mencari simpati publik. Akibatnya, nilai-nilai pendidikan seperti keadilan, kedisiplinan, dan pembinaan karakter bisa terdistorsi oleh kepentingan politik tertentu. Ketika konflik internal sekolah dibawa ke ranah politik dan media, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan lembaga pendidikan dalam menyelesaikan persoalannya secara profesional. Hal ini dapat memperlemah citra lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter dan moral siswa. Kasus di SMP Negeri 5 Singaraja yang merupakan satu dari sekian banyak kasus menunjukkan pentingnya menjaga independensi dunia pendidikan dari intervensi politik. Politisasi terhadap peran guru atau lembaga pendidikan tidak hanya merusak sistem dan tata kelola sekolah, tetapi juga mengancam tujuan utama pendidikan, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b) Upaya Menjaga Profesionalitas Guru di Tengah Politisasi

Tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah membentuk generasi yang unggul, kompetitif, terampil, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 ayat 5 undang-undang yang sama disebutkan bahwa “tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pada ayat 6, pendidik diartikan sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, atau fasilitator, yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya”. Guru memiliki posisi dan peranan yang

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, guru disebut sebagai pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Dengan statusnya sebagai profesi, maka seorang guru dituntut untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi guru menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Peserta didik diibaratkan sebagai kertas putih yang akan diwarnai oleh gurunya; artinya, kualitas peserta didik sangat bergantung pada sejauh mana guru mampu menjalankan perannya dengan kapasitas profesional dan tanggung jawab moral. Guru yang kompeten tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mentalitas siswa agar siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari sektor pendidikan. Melalui pendidikan baik formal maupun nonformal manusia dapat dikembangkan secara utuh. Pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui proses belajar mengajar yang melibatkan dua komponen utama, yaitu guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar, yang bersama-sama berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. politik dilingkungan sekolah atau perguruan tinggi memang sangat penting guna menyuplai berbagai kepentingan seperti anggaran, kurikulum serta kepentingan lainnya. Akan tetapi politik tetap sesuai dengan kadar untuk menyesuaikan standar mutu pendidikan.

Kampanye politik di lingkungan sekolah dan kampus memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kegiatan kampanye politik dapat menjadi sarana edukatif bagi siswa dan mahasiswa untuk mengenal dunia politik, memahami sistem demokrasi, serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya sering kali lebih dominan, seperti hilangnya netralitas lembaga pendidikan, munculnya polarisasi di antara peserta didik, serta tergesernya fokus utama pendidikan dari orientasi akademik ke kepentingan politik. Untuk menjaga netralitas dan independensi lembaga pendidikan, diperlukan pengawasan dan pengaturan yang ketat dari pemerintah, termasuk pengendalian terhadap aktivitas politik di sekolah maupun kampus. Menurut Azizah (2020), keterlibatan sekolah dan kampus dalam kegiatan politik dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa dan mahasiswa, terutama jika mereka ikut serta dalam kegiatan kampanye atau terpapar isu politik yang memihak kepada kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi memecah persatuan di lingkungan pendidikan, menciptakan perpecahan pandangan politik, dan menurunkan motivasi akademik.

Kampanye politik di lingkungan kampus juga dapat memengaruhi kebebasan berekspresi mahasiswa. Ketika suatu institusi pendidikan dianggap memiliki kedekatan atau dukungan terhadap partai politik tertentu, mahasiswa dengan pandangan politik berbeda sering kali merasa tertekan dan enggan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Secara umum, keterlibatan politik

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

dalam dunia pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya polarisasi di kalangan peserta didik, menurunnya objektivitas dalam pembelajaran, dan melemahnya kepercayaan terhadap netralitas lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penerapan regulasi yang lebih tegas, penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan profesionalisme guru, pembentukan dewan etika pendidikan, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menjaga independensi dunia pendidikan.

Salah satu cara efektif untuk menghadapi pengaruh politik dalam pendidikan adalah melalui pendidikan politik yang objektif dan sistematis. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang baik, siswa dapat memahami mekanisme sistem politik, mengenali hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik yang berkembang di masyarakat. Dengan pemahaman politik yang matang, peserta didik akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, sehingga tujuan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kecerdasan bangsa tetap dapat terjaga. Menyikapi berita yang dikutip oleh penulis alangkah bagusnya para politikus tersebut mempercayakan instansi pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan didalam.

Panggung politik tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh oknum siswa dan mahasiswa untuk mencari sebuah validasi untuk sosial media atau platform yang mereka gunakan. Disamping itu profesionalisme seorang guru merupakan aspek yang mutlak dimiliki oleh setiap pendidik, karena guru berperan sebagai aset intelektual bangsa yang sangat berharga dalam pelaksanaan pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berdaya saing, dan berakhlak mulia, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai tingkat profesionalisme tersebut tidaklah mudah. Diperlukan proses pendidikan dan pelatihan yang relevan serta berkesinambungan agar seorang guru benar-benar menguasai bidang profesinya.

Profesionalisme guru yang baik tidak hanya menciptakan kualitas pengajaran yang tinggi, tetapi juga mampu menumbuhkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Dalam konteks profesionalisme, seorang guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi profesional, yang berkaitan dengan penguasaan materi dan bidang keilmuan; kompetensi pedagogik, yang menyangkut kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif; kompetensi kepribadian, yang mencerminkan kepribadian yang mantap, berakhlak, dan berwibawa; serta kompetensi sosial, yang menunjukkan kemampuan berinteraksi secara baik dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Keempat kompetensi ini menjadi landasan penting dalam membentuk sosok guru yang profesional dan berintegritas dalam dunia pendidikan.

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

IV. Simpulan

Politisasi terhadap peran guru dalam pembentukan karakter siswa menunjukkan bahwa intervensi kepentingan politik dalam dunia pendidikan dapat mengganggu fungsi utama guru sebagai pendidik dan pembentuk moral generasi bangsa. Guru sejatinya memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter, etika, dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik. Namun, ketika politik masuk ke ruang pendidikan, netralitas dan profesionalisme guru dapat terancam, yang pada akhirnya berpotensi menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan karakter menuju kepentingan kekuasaan.

Dampak dari politisasi ini tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Munculnya tekanan politik, keberpihakan, serta perpecahan di lingkungan pendidikan dapat menurunkan kualitas pembelajaran dan mencederai nilai-nilai moral yang ingin ditanamkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas untuk menjaga independensi dunia pendidikan dari kepentingan politik praktis. Guru harus diberi ruang untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan nilai-nilai pendidikan dan etika, bukan politik. Dengan menjaga netralitas dan profesionalisme guru, pendidikan dapat kembali pada esensinya, yaitu membentuk generasi yang berakarakter, berdaya saing, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik apa pun.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid. (2006). Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asrori, M. (2015). Politik dan Pendidikan (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia). J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Azwar, S. 2003. Prestasi Belajar (Y) Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bintang, V., Tangko, Y. T., Yanti, D., Padatu, J. G., & Palinggi, M. D. (2023). Misi Gereja Di Era Digital: Pemanfaatan Teknologi Untuk Menjangkau Generasi Baru. Jurnal Komunikasi.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Depdiknas. 2004. Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th 2003). Jakarta : Sinar Grafika.
- Khoiri, A., Zaini, & Munib, A. (2021). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Era New Normal. Jurnal Sumenep.
- Kristini, E. (2020). Pembelajaran Berbasis Literasi Berbantuan Media TIK dengan Metode Pemberian Tugas untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Jurnal

Politisasi terhadap Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Kadek Agus Wardana, I Made Wirahadi Kusuma

Mimbar Ilmu.

Siswadi, G. A. (2023a). Konsep Kebebasan dalam Pendidikan Perspektif Rabindranath Tagore dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan.

Slameto. 2005. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Subekti, A., & Hartono, T. (2020). Pengaruh Regulasi Anti-Politik dalam Pendidikan untuk Menjaga Netralitas Sekolah dan Kampus di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan.

Sunarto dan Hartono, B.A. 2002. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyadi, A. (2018). Dampak Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Jurnal Pendidikan.

Syah. Muhibbin, 2002. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen. (UU RI No.14 Th 2005). Jakarta

Wahyudi, Imam. 2012. Mengejar Profesionalisme Guru. Jakarta. Prestasi Pustaka